



Judul : Komisi II DPR Soroti Peran Bawaslu di Gakkumdu
Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Komisi II DPR Soroti Peran Bawaslu di Gakkumdu

KOMISI II DPR menyoroti peran Bawaslu dalam menjalankan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Pasalnya, koordinasi antar-tiga pilar, yakni Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan sering kali tak berjalan sebagaimana mestinya sehingga impelentasi di lapangan menjadi bias.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan peran Gakkumdu jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, peran Gakkumdu sangat vital dalam menjaga tidak terjadinya praktik politik uang.

"Siapa ketua koordinator Gakkumdu ini? Bagaimana koordinasi ia dengan penegak

hukum? Ini belum jelas," tegas Junimart, kemarin.

"Jangan nanti Bawaslu ini jadi banci dan mohon maaf ini untuk menghindari transaksional. Ketika satu perkara pemilu ini masuk ke tahap selanjutnya ini berhenti, kenapa berhenti kita enggak tahu," tambahnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengemukakan bahwa Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu ialah anggota Bawaslu yang khusus membidangi penanganan pelanggaran.

Nantinya, anggota Bawaslu bidang penanganan pelanggaran itu akan berkolaborasi dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk membangun kes-

epahaman yang sama dalam memaknai norma pengaturan pelanggaran pidana pemilu.

"Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu ialah anggota Bawaslu yang membidangi penanganan pelanggaran. Pelanggaran pidana tidak yang lain hanya pidana," tegas Bagja.

Sentra Gakkumdu, kata Bagja, tidak hanya makna legalistik prosedural, tapi juga lebih dari itu dimaksudkan dalam rangka mengafirmasi keadilan pemilu.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengaku pesimistis dengan proses penegakan Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024.

"Saya pesimistis dengan kinerja Sentra Gakkumdu. Bahkan, saya dengar durasi berapa lama sekretariat Gakkumdu itu dibiayai dalam proses Pemilu 2024 hanya tiga bulan saja," terang Fadli.

Menurutnya, hal itu pasti akan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Bawaslu. Fadli juga menilai selama ini penunjukan jaksa hingga polisi yang ditugaskan di Bawaslu juga tidak profesional lantaran sering kali ada intervensi dari atasannya.

"Hal itu sering kali menghambat proses penegakan hukum di Gakkumdu dan itu yang terjadi selama ini," tandasnya. (Ykb/P-1)